



BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jl. POM IX Kampus Palembang
Telp. 0711-310633 Fax 0711-319819 Kode Pos 30137**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum	I - 1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	I – 3
1.2.1 Tugas Pokok	I - 3
1.2.2 Fungsi	I - 3
1.2.3 Struktur Organisasi	I - 4
1.3 Dasar Hukum	I - 4
1.4 Maksud dan Tujuan RKT Tahun 2024	I - 6
1.5 Manfaat RKT Tahun 2024	I - 7
1.6 Keterkaitan RPJMD, Renstra	I - 7
1.7 Keterkaitan dengan Anggaran	I - 7
1.8 Sistematika RKT Tahun 2024	I - 8
BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
2.1 Rencana Stategis (RENSTRA)	II - 1
2.2 Visi dan Misi	II – 2
2.2.1 Pernyataan Visi	II - 2
2.2.2 Pernyataan Misi.....	II - 3
2.3 Isu – isu yang Berpengaruh	II - 4
2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis	II - 15
2.4.1 Tujuan	II – 15
2.5 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	II - 21
2.6 Manajemen Pengelolaan Risiko	II - 24
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
3.1 Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Anggaran	III - 1
3.2 Anggaran Kinerja	III - 6
BAB IV PENUTUP	
Penutup	IV - 1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL		Halaman
Tabel 2.1	Matriks Analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	II - 8
Tabel 2.2	Analisis Faktor Pembentuk Dua Ketidakpastian Utama	II - 10
Tabel 2.3	Hasil Analisa Skenario 1 Foresight.....	II - 12
Tabel 2.4	Hasil Analisa Skenario 2 Foresight	II - 13
Tabel 2.5	Hasil Analisa Skenario 3 Foresight	II - 13
Tabel 2.6	Hasil Analisa Skenario 4 Foresight	II - 14
Tabel 2.7	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026	II - 20
Tabel 2.8	Tabel Pohon Kinerja OPD	II - 21
Tabel 2.9	Sasaran Strategis, IKSS dan Meta Indikator Kinerja Utama	II - 22
Tabel 3.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke – 4	III - 1
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	III – 3
Tabel 3.3	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	III - 7

DAFTAR GAMBAR		Halaman
Gambar 2.1	Analisis Foresight.....	II - 10
Gambar 2.2	Balanced Score Card (BSC)	II - 18
Gambar 2.3	Proses Manajemen Risiko	II - 11
Gambar 3.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke – 3	III - 1
Gambar 3.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	III – 3

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

**BAB II
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis serta pelaksanaan program kegiatan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2024 - 2026 yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program kegiatan serta sub kegiatan dan kebijakan anggaran dalam Perangkat Daerah yang akan dicapai pada periode tahun berjalan.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan dan indikator kinerja beserta target berdasarkan program kegiatan serta sub kegiatan, arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Sementara perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target kinerja dari program kegiatan serta sub kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan tujuan, program, arah kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah target dari capaian indikator kinerja dari outcomes dan output yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahterah dan makmur, diperlukan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagaimana manivestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka tercapainya visi dan misi penyelenggaraan pemerintah yang baik dan

bersih (*Good and Clean Governance*), yang dicirikan oleh pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel yang mampu menempatkan masyarakat sebagai stakeholder dalam pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, melalui kebijakan ini presiden menginstruksikan kepada setiap gubernur, bupati dan kepala instansi/unit kerja di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan membuat :

- a. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap awal tahun kerja pada instansi / Unit kerja yang dipimpinnya.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Instansi/Unit Kerja di daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan terhadap wajib pajak dalam tahun 2023 akan melaksanakan beberapa kegiatan bidang pengelolaan pendapatan yang didukung oleh dana APBD Provinsi, untuk itu perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024, agar penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan daerah dapat dilaksanakan dengan baik, terukur dan terarah, obyektif dan transparan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas-tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah dan sebagai koordinator dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah lainnya. Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, sistematis dan pencapaian kinerja yang optimal maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. Agar dalam

pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan tersebut terarah dan mampu mencapai sasaran dan tujuan maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini memuat rencana capaian atau target kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target yang disusun telah menjadi komitmen untuk dilaksanakan dalam Tahun 2025. Melalui penetapan target kinerja di Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, diharapkan akan menjadi dasar pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

1.2.1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja.
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
- Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang Perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah
- Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang – undangan yang berlaku
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
- Pembinaan terhadap UPTB dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- Kepala Badan
- Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Bidang Pajak, membawahi:
 - Subbidang Pajak;
 - Subbidang Pembukuan; dan
 - Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi.
- Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, membawahi:
 - Subbidang Retribusi;
 - Subbidang Penerimaan Pusat; dan
 - Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain.
- Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
 - Subbidang Wilayah I;
 - Subbidang Wilayah II; dan
 - Subbidang Wilayah III.
- Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah;
 - Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah; dan
 - Subbidang Hukum dan Perundang-Undangan.
- Unit Pelaksana Teknis Badan
- Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 -2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN Nomor 239/IX/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dengan harapan :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih objektif, karena rencana dan target yang telah ditetapkan pada awal tahun kerja.
- b. Dapat memacu kinerja pada Instansi yang dipimpinnya karena setiap unit kerja memiliki beban dan tanggungjawab untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan.
- c. Pelaksanaan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setelah tahun anggaran berakhir dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan wahana untuk mencapai kesepakatan dan memantapkan komitmen satuan kerja. Untuk itu kinerja harus memuat spesifikasi yang jelas dan dapat dijadikan sebagai dasar akuntabilitas atas prestasi yang telah disepakati dalam komitmen kinerja.

Para pimpinan satuan unit pelayanan/bidang lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dituntut profesional dalam melaksanakan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi juga dituntut lebih akuntabel, dalam pengertian tidak hanya memenuhi standar atau spesifikasi dalam komitmen kinerja, tetapi lebih jauh dari itu, agar sumber daya yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih efektif dan efisien lagi.

Suatu tujuan dalam misi tersebut dalam prakteknya dicapai dengan usaha dari beberapa satuan unit pelayanan/bidang, oleh karena itu, Pimpinan satuan unit pelayanan/bidang harus dibebani tanggung jawab untuk memenuhi target-target kinerja dalam RKT dan diimbangi dengan pemberian kewenangan dan sumber daya yang memadai.

1.5. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja Tahunan 2024 mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Menghubungkan RPJMD, Renstra, Rencana Tindak, maupun Perencanaan Operasional yang terinci;
- b. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran;
- c. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja;
- d. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik peningkatan kinerja;
- e. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit pelayanan;
- f. Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan pencapaian kinerja.

1.6. Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan tujuan jangka menengah, sasaran tahunan, dan indikator kinerja sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja diorganisasi dan kerangka untuk perencanaan kinerja dan rencana anggaran tahunan.

Perencanaan Kinerja yang sumber dananya berasal dari APBD, Kinerja sasarannya menjadi bahan utama dalam menyusun dokumen rencana kerja anggaran, yang pada akhirnya menjadi dokumen Arah dan Kebijakan Umum (KUA dan PPAS) APBD.

1.7. Keterkaitan dengan Anggaran

Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka penyesuaian sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran dan ketersediaan anggaran. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

1.8. Sistematika Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir itu, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Bab. I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, menjabarkan maksud dan tujuan, manfaat penyusunan dan penyampaian RKT Tahun 2025, keterkaitan Renstra, keterkaitan anggaran serta sistematika RKT.
- Bab. II : Rencana Strategis (RENSTRA), menjelaskan muatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Tujuan dan Sasaran Strategis, Isu Strategis, Arah dan Kebijakan serta Strategi.
- Bab. III : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, menjelaskan Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.
- Bab. IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Lampiran I Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025

Lampiran II Matriks Rencana Kerja Tahun 2025

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

**BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala (Threat) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Strategis Instansi Pemerintah.

Selain menggunakan analisis SWOT yang menganalisa “Kekurangan dan Kekuatan” serta “Peluang dan Tantangan” terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah ke depan, perlu juga dilakukan analisa *foresight* untuk melihat masa depan Bapenda sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah.

Adapun tujuan dan manfaat dalam analisa *foresight* sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kepercayaan bagi institusi, *foresight* dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri bagi Bapenda dalam membuat kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah yang lebih optimal;
2. Memberikan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, sehingga sinergi dan kolaborasi antar stakeholder terwujud untuk pengelolaan pendapatan daerah yang transparansi di era transformasi digital;

3. *Foresight* memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam ketidakpastian yang tinggi, hal ini salah satu yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak risiko dalam jangka panjang dari kebijakan yang diambil;
4. *Foresight* memberikan evaluasi dari suatu kebijakan yang diambil terhadap program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Metode analisis foresight dengan melihat kondisi “Masa Kini dan Masa Depan” serta “Keinginan dan Kenyataan”.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera selatan mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang mengandung tujuan, sasaran strategis, program kegiatan dan sub kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. Rencana Strategis (RENSTRA) bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 053/KPTS/BAPENDA/2022.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1. Pernyataan Visi

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 111 bahwa Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJPD dan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dinyatakan dengan visi yang ingin dicapai yaitu, “Sumatera Selatan Mapan Tahun 2045”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu, (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

2.2.2. Pernyataan Misi

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi yang terdapat pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan yaitu "Sumatera Selatan Mapan Tahun 2045".

Selanjutnya misi ke 4 (empat) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.
2. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.
3. Revitalisasi insfrastruktur pelayanan publik, baik secara manual maupun online.
4. Meningkatkan jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh publik secara online 24 jam/hari, 7 hari/minggu.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua bidang.
6. Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah.
7. Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh lembaga pemerintahan.
8. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam rangka pencegahan terhadap tindak korupsi dan tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*).
9. Menempatkan posisi semua *stakeholder* (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan Maju.
10. Memfasilitasi forum kepala daerah se-Sumatera Selatan dengan menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu.

11. Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penyerapan aspirasi dan mendorong keunggulan potensi masyarakat.
12. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah.
13. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam pembangunan daerah.

2.3. Isu-isu yang berpengaruh

Penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melakukan identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT.

Hasil identifikasi lingkungan strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Peluang Eksternal

I. Politik

Kecenderungan politik yang telah dan sedang berkembang yang akan memberikan peluang :

1. Reformasi di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Kebijakan ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan kemandirian fiskal daerah khususnya dalam memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari eksekutif dan legislatif daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumsel yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang menjadi potensi pendapatan daerah.

II. Ekonomi

Perkembangan bidang ekonomi yang turut memberikan peluang dengan adanya kontribusi positif dan situasi kondusif adalah :

1. Kondisi perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat dan mengalami laju pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.
2. Potensi Sumber Daya Alam dan peluang investasi yang besar dan belum dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah umumnya dan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

III. Sosial

Beberapa trend sosial yang terjadi dimasyarakat memberikan peluang antara lain :

1. Masyarakat yang sudah melek teknologi menjadikan sosial media untuk tempat sosialisasi pelayanan pajak maupun peraturan-peraturan yang dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone*.
2. Menguatnya kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan pemerintahan *clean government* dan *good governance* disertai dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik sebagai kompensasi atas kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

IV. Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menawarkan efisiensi kerja dan akurasi dalam pengelolaan data dan arus informasi.

V. Kolaborator dan Kompetitor.

1. Adanya delegasi kewenangan di antara badan-badan unit pengelola pajak dan retribusi daerah sehingga dapat memecahkan masalah antara Bapenda sebagai koordinator penerimaan pendapatan daerah.
2. Terdapat 15 Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
3. Terdapat BUMN dan BUMD di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal).
5. Makin terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun media massa dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

b. Ancaman Eksternal

I. Ekonomi

1. Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan Nopol Non BG, yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel.
2. Tidak Stabilitasnya Harga Komoditas Utama Sumatera Selatan Terutama Sektor Perkebunan yang berpengaruh langsung pada pendapatan masyarakat Sumatera Selatan;
3. Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui show room tanpa melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II);
4. Adanya pengaruh resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini mengakibatkan :
 - Gejolak perekonomian global sehingga penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal;
 - Tunggakan pajak yang diakibatkan penarikan *dealer*/penyedia kredit terhadap kendaraan bermotor;
 - Penurunan kemampuan daya beli masyarakat.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

II. Sosial

Masih adanya penolakan wajib pajak/wajib retribusi daerah.

III. Teknologi

1. Belum optimalnya transfer informasi dan teknologi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
2. Kemampuan *utilities* teknologi masih rendah

IV. Kolaborator

Belum optimalnya koordinasi upaya pencapaian target pendapatan daerah dari masing-masing pihak.

c. Kekuatan Internal

1. Kebijakan pemutihan pajak;
2. Kebijakan penetapan pajak progressif;
3. Bapenda Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Provinsi Sumsel;
4. Memiliki tujuan dan sasaran strategis yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan;

7. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai;
8. Terdapat 30 UPTB yang tersebar di 17 Kabupaten/kota;
9. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak dan non pajak;
10. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait;
11. Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.

a. Kelemahan Internal

1. Pelayanan pembayaran pajak belum optimal dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen berbasis Informasi Teknologi;
2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak;
3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak;
4. Belum optimalnya sistem evaluasi dan tindak lanjut pelayanan;
5. Belum optimalnya penerapan disiplin PNS;
6. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar;
7. Rendahnya kemampuan utilities teknologi;
8. Distribusi pegawai yang belum merata pada setiap UPTB;
9. Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal;
10. Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak.

Adapun analisa matrik SWOT yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Matriks Analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

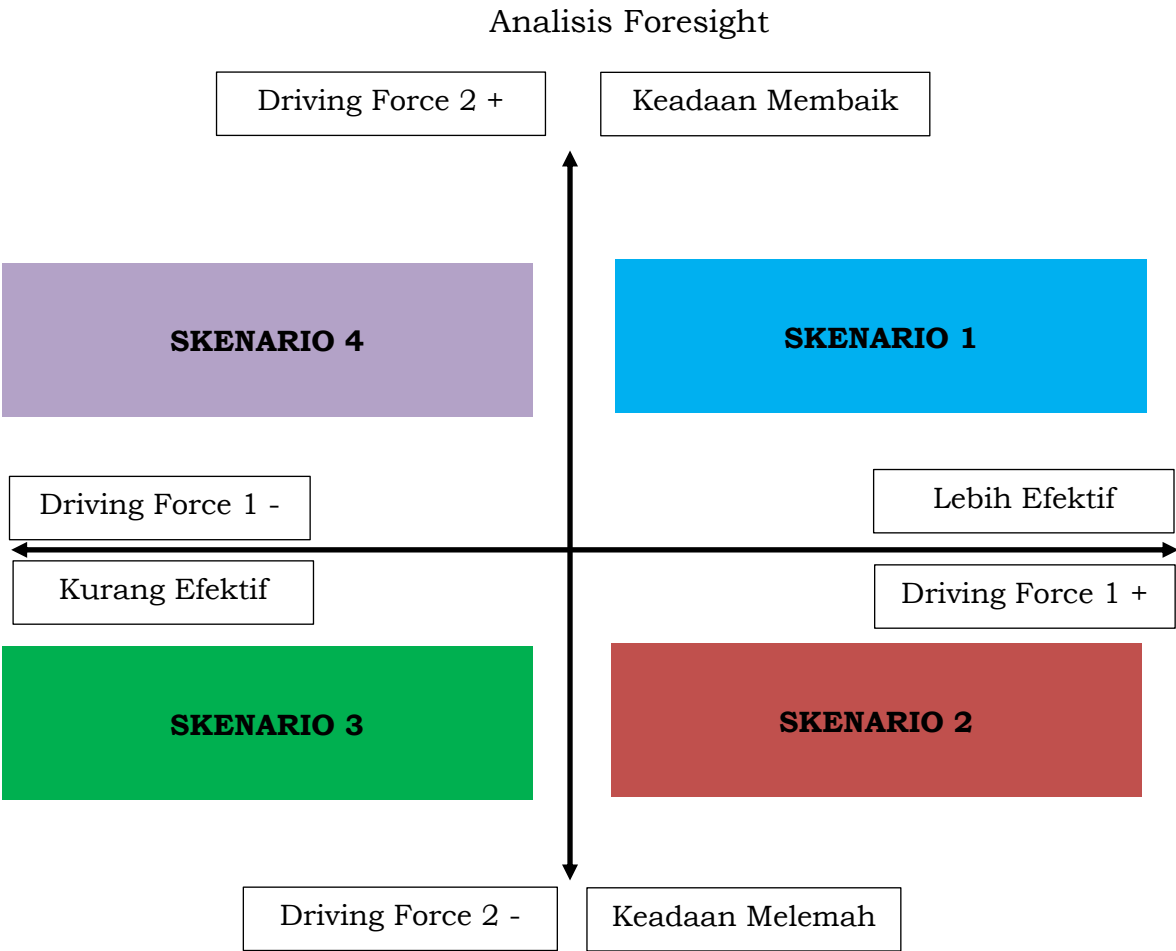
FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITIES) - UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang memberikan otonomi kepada daerah; - UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD; - Reformasi di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022; - Perda Prov. Sumsel No. 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Prov. Sumsel; - Komitmen Eksekutif dan Legislatif Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah; - Potensi Sumber Daya Alam dan pariwisata yang besar; - Perkembangan teknologi informasi yang pesat; - Perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat; - Terdapat 15 Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah; - Terdapat BUMN dan BUMD di wilayah Prov. Sumsel; - Kebijakan Pemutihan Pajak; - Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal); - Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Prov. Sumsel; - Terdapat kebijakan Kementerian Keuangan tentang PMK.	TANTANGAN (THREATS) - Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan Nopol non-BG yang beroperasi di wilayah Prov. Sumsel; - Pemungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal; - Adanya kebijakan Bank Indonesia tentang batasan minimal uang muka (DP) untuk pengambilan kredit kendaraan bermotor; - Belum optimalnya kontribusi/sumbangan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BUMN maupun BUMS kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; - Perkembangan BUMD belum menggembirakan sehingga kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kecil; - Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui <i>show room</i> tanpa melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II); - Adanya pengaruh resesi ekonomi akibat pandemi covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi yang belum stabil; - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak; - Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan Pendapatan Daerah).
	KEKUATAN (STRENGHT) : - Kebijakan penetapan pajak progressif; - Bapenda Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Provinsi Sumsel; - Memiliki visi, misi yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan pendapatan daerah; - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. - Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan; - Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai; - Terdapat 30 UPTB yang tersebar di 17 Kabupaten/kota; - Tersedapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak dan non pajak; - Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait; - Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.	Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang - Reformasi birokrasi organisasi; - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui upaya perbaikan mutu pelayanan.
	KELEMAHAN (WEAKNESSES) : - Pelayanan pembayaran pajak belum menggunakan sistem informasi komputerisasi berbasis teknologi; - Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak; - Kurangnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak; - Belum optimalnya sistem evaluasi dan tindak lanjut pelayanan; - Kurangnya penerapan disiplin PNS; - Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar; - Rendahnya kemampuan <i>utiliez</i> teknologi; - Distribusi pegawai yang belum merata pada setiap UPTB; - Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal; - Belum pernah dilakukan kajian kepuasan pelanggan; - Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak.	Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); - Meningkatkan penerimaan bagian Dana Perimbangan; - Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
		Strategi WO Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang - Peningkatan kualitas SDM melalui upaya pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan; - Meningkatkan disiplin pegawai melalui pendekatan formal dan informal.
		Strategi WT Meminimalkan Kelemahan untuk menghindari ancaman. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana organisasi.

Berdasarkan analisis kritisal tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
3. Usulan perubahan regulasi dari Dana Perimbangan, terutama Dana Bagi Hasil pengelolaan Sumber Daya Alam secara lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil migas;
4. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah;
5. Peningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
6. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah;
7. Peningkatkan daya dukung sarana prasarana;
8. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
9. Peningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Metode analisis foresight dengan melihat kondisi "Masa Kini dan Masa Depan" serta "Keinginan dan Kenyataan" seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.1



Dari skema gambar 3.1 dan 3.2 tersebut diatas, terbentuk 4 (empat) kuadran yang menggambarkan kondisi “respons pemerintah daerah terhadap kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022” yang mewakili aspek-aspek pengambilan kebijakan dan tingkat kolaborasi dalam situasi pemulihan ekonomi dan penetrasi inflasi daerah. Respons pemerintah daerah ini membentuk sumbu horizontal yaitu [1]. Lebih efektif dan [2]. Kurang efektif. Kemudian 5 (lima) faktor yang mewakili respon pemerintah daerah yaitu :

1. Kebijakan Kapasitas Fiskal Daerah;
2. Program Pemerintah Daerah yang memastikan Penerimaan Pendapatan Daerah tercapai atau melampaui target;
3. Kebijakan Pemulihan Ekonomi pasca pandemi Covid – 19;
4. Kerjasama antar institusi (*cross cutting*) dengan Bapenda termasuk Pemerintah Pusat;
5. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta.

Sementara sumbu vertikal membentuk “tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan” yaitu [1]. Keadaan membaik; [2]. Keadaan melemah. Empat faktor yang dapat mewakili “tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Daya saing daerah;
2. Harga komoditas relatif stabil;
3. Laju inflasi terkendali;
4. Pendapatan income perkapita.

Berikut disajikan tabel hasil analisis *foresight* sebagai gambaran untuk mengeliminasi “ketidakpastian” utama yang mungkin bisa menjadi hambatan dalam pencapaian tugas dan fungsi Bapenda periode tahun 2024 – 2026 :

Tabel 2.2
Analisis Faktor Pembentuk Dua Ketidakpastian Utama

Tujuan		:	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	
Sasaran Strategis		:	1.	Meningkatnya pendapatan daerah
			2.	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
			3.	Meningkatnya kemandirian daerah dalam pembangunan yang bersumber pada pendanaan pendapatan asli daerah
Respons Pemerintah Daerah terhadap kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022				
Kurang Efektif (<i>do nothing</i>)			Lebih Efektif (<i>do something</i>)	
1.	Kebijakan kapasitas fiskal daerah kurang bisa merespon		1.	Kebijakan kapasitas fiskal daerah lebih cepat merespon
2.	Program kegiatan sub kegiatan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 kurang adaaktif		2.	Program kegiatan sub kegiatan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 lebih adaaktif
3.	Kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19 kurang efektif		3.	Kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19 lebih efektif
4.	Kerjasama antar institusi (<i>cross cutting</i>) kurang efektif		4.	Kerjasama antar institusi (<i>cross cutting</i>) lebih efektif
5.	Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta kurang efektif		5.	Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta lebih efektif
Tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan				
Keadaan Melemah (<i>do nothing</i>)			Keadaan Membaik (<i>do something</i>)	
1.	Daya saing daerah yang rendah		1.	Daya saing daerah yang membaik
2.	Harga komoditas unggulan Sumatera Selatan tidak terkendali		2.	Harga komoditas unggulan Sumatera Selatan relative stabil
3.	Laju inflasi daerah masih tinggi		3.	Laju inflasi daerah yang terkendali
4.	Pendapatan income per kapita masih rendah		4.	Pendapatan income per kapita membaik

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2022

Terhadap empat skenario yang dihasilkan pada sumbu vertikal dan horizontal telah digambarkan sebagaimana pada gambar 2.2 merupakan prediksi gambaran yang akan pada Bapenda selama kurun waktu periode 2024 – 2026. Setiap skenario memberikan gambaran pada Bapenda tahun 2024 – 2026 pada sektor sebagai berikut : [1]. Kapasitas SDM; [2]. Produktivitas Aset; [3]. Kelembagaan; [4]. Pertumbuhan Pendapatan Daerah; [5]. Potensi Retribusi Yang Digali, maka

disimpulkan ada 4 (empat) skenario dengan implikasinya sebagai berikut:

- 1. Skenario 1 (kuadran I) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)

Tabel 2.3
Hasil Analisa Skenario 1 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2024 – 2026			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 1 : Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Peningkatan kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 86 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 86 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 25 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Penambahan kantor layanan samsat
		d.	Terbentuknya otoritas pengadilan pajak di Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi optimis diatas 8,33 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Kerjasama dengan OPD terkait meningkat terkait dengan terobosan inovasi dalam menggali sumber – sumber retribusi baru
		b.	Kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2022

- 2. Skenario 2 (kuadran II) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (4,89 – 5,02)

Tabel 2.4
Hasil Analisa Skenario 2 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2024 – 2026			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 2 : Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (range 4,89 – 5,02)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Peningkatan kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 10 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi pesimis range 2,33 – 2,50 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Jenis retribusi hanya berdasarkan apa yang sudah di tetapkan oleh kebijakan nasional
		b.	Sebagian kecil kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Belum dilakukan pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2022

3. Skenario 3 (kuadran III) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (4,89 – 5,02)

Tabel 2.5
Hasil Analisa Skenario 3 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2024 – 2026			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 3 : Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (range 4,89 – 5,02)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Tidak ada penambahan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Tidak ada kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita

			minimal 30 % terpenuhi
		d.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Tidak terpenuhinya kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 10 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Tidak terbentuknya Pengadilan Pajak di Wilayah Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi pesimis range 2,33 – 2,50 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Jenis retribusi hanya berdasarkan apa yang sudah di tetapkan oleh kebijakan nasional
		b.	Sebagian kecil kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Belum dilakukan pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2022

4. Skenario 4 (kuadran IV) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)

Tabel 2.6
Hasil Analisa Skenario 4 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2024 – 2026			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 4 : Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Tidak ada penambahan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Tidak ada kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Tidak terpenuhinya kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 15 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi

			rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Terbentuknya Pengadilan Pajak di Wilayah Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi optimis diatas 6,24 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Kerjasama dengan OPD terkait meningkat terkait dengan terobosan inovasi dalam menggali sumber – sumber retribusi baru
		b.	Sebagian besar kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Mulai diberlakukannya pemanfaatan platform digitalisasi

2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.4.1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPD.

Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 – 2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dokumen RPD dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 - 2026 adalah “Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks realisasi pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 mencapai nilai indeks 0,412

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam RPD Tahun 2024 - 2026 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2019 - 2023 serta menjabarkan tujuan dan sasaran dalam RPD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan Renstra ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 (SS.1) : Meningkatnya pendapatan daerah

Untuk mewujudkan tujuan :

1. meningkatnya penerimaan sektor pajak daerah;
2. menurunnya tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah;
3. meningkatnya penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain;
4. meningkatnya standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sasaran Strategis 2 (SS.2) : Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mewujudkan tujuan :

1. meningkatnya potensi penerimaan yang digali menjadi sumber pendapatan;

Sasaran Strategis 3 (SS.3) : Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

Untuk mewujudkan tujuan :

1. agar daerah lebih kreatif dan inovasi dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang ada menjadi kekuatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan;

2. mengurangi ketergantungan dana transfer pusat sebagai sumber pendapatan daerah;

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metode Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective and learning and growth perspective, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Stakeholders Perspective

Mencakup SS.1 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 1 Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Customer Perspective

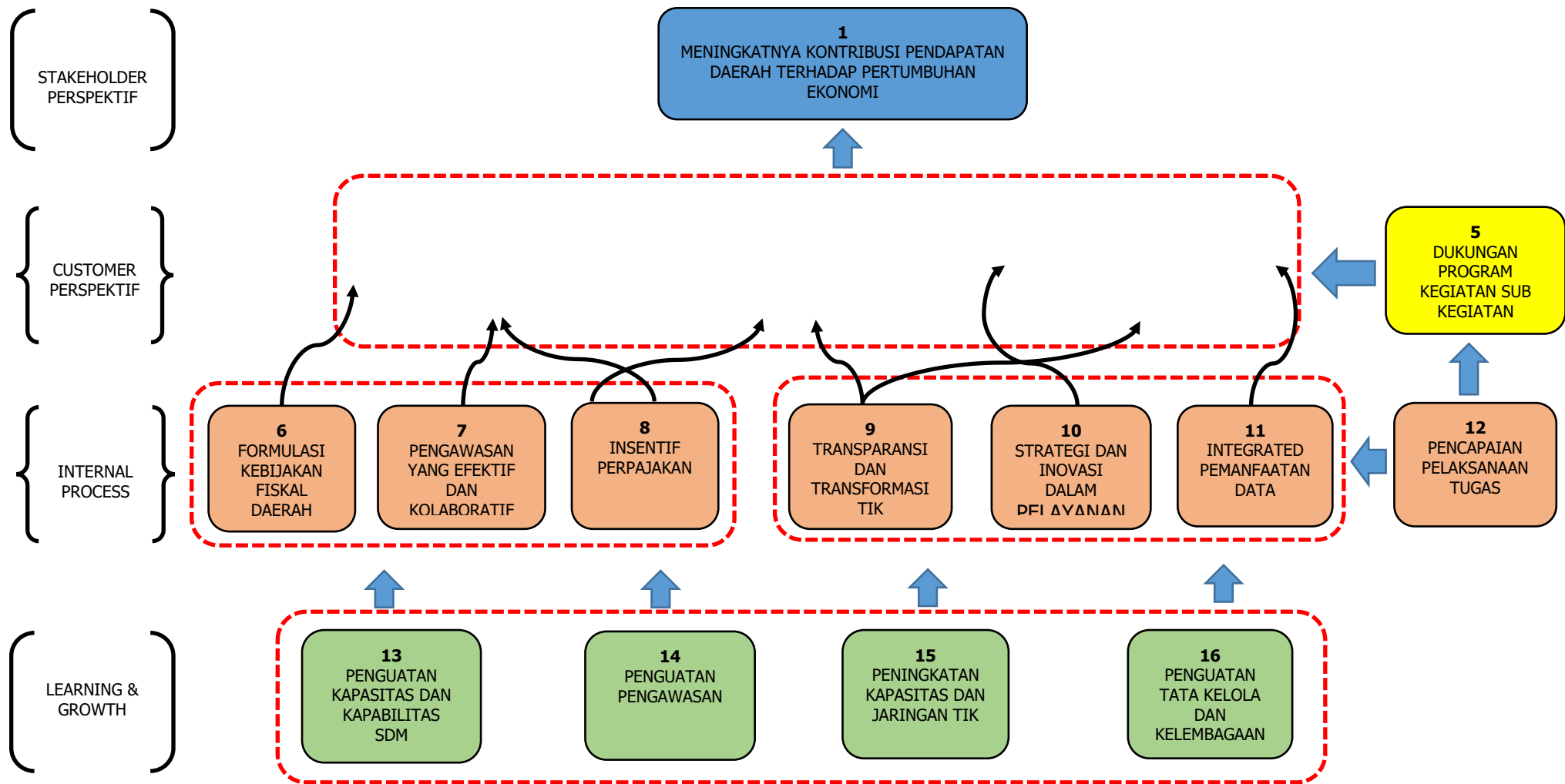
Mencakup SS.2 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 2 Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas;
- IKSS 3 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah.

3. Internal Process Perspective and Learning and Growth Perspective

Mencakup SS.3 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 4 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi



Gambar 2.2
Balanced Score Card (BSC)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 menjadi acuan dan pedoman Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah dalam tiga tahun kedepan adalah :

Tabel 2.7

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Indeks tahun 2026 = 0,412)	1 Meningkatkan Pendapatan Daerah	1. Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	91,97	92,03	92,21
			2 Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap PDRB	2. Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Persentase	0,95	0,96	0,98
				3. Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,00	1,12	1,18
			3 Meningkatkan Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	4. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	Persentase	4,00	5,00	6,00

2.5. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disajikan dalam tabel pohon kineja (pohon kinerja lengkap terlampir dalam dokumen Renstra) sebagai berikut :

Tabel 2.8
Tabel Pohon Kinerja OPD

Tujuan OPD	:	Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi		
Indikator Tujuan	:	Indeks realisasi pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	:	0,412 Indeks
Sasaran Strategis		Intermediate Outcome Level 1	Intermediate Outcome Level 2	
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatnya penerimaan sektor pajak daerah	Terupdatenya data potensi pajak daerah	
			Meningkatnya nilai ketertagihan piutang pajak	
			Meningkatnya akses layanan wajib pajak	
		Menurunnya tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah	Pengawasan internal yang baik	
			Meningkatnya kemampuan (ability) atau kapasitas personil pengawasan	
		Meningkatnya penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	Meningkatnya kontribusi perusahaan yang mendapatkan penyertaan modal	
			Bertambahnya Jenis Retribusi	
		Meningkatnya standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kapsitas jaringan pelayanan TIK	
			Meningkatnya inovasi layanan berbasis TIK	
		2.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan
Optimalisasi pemanfaatan asset yang dikerjasamakan				
Meningkatnya kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga				
3.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Berkurangnya angka koreksi PAD Terhadap Belanja APBD yang pendanaannya bersumber pada PAD	Jumlah belanja APBD yang pendanaannya bersumber pada PAD	
	Program Nomenklatur Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 sebagai berikut :			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			

Tabel 2.9

Sasaran Strategis, IKSS dan Meta Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS (SS)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		FORMULASI	META INDIKATOR
	SS.1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	IKSS.1	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$y = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Target PAD Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : y = persentase realisasi pencapaian PAD RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n Target Tahun n = Target Pendapatan Tahun ke n	Realisasi pendapatan asli daerah merupakan angka realisasi pendapatan asli daerah, dimana : Semakin tinggi pencapaian realisasi, semakin baik pula kinerja pendapatan asli daerah
	SS.2	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	IKSS.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$ Dimana : Jumlah PAD = Realisasi PAD tahun ke n PDRB = PDRB Non Migas	PDRB Non Migas merupakan angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan
			IKSS.3	Rasio PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran	$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB PKPD}}$ Dimana :	PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah merupakan angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik

				Pemerintah Daerah	Jumlah PAD = Realisasi PAD tahun ke n PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	(BPS) Provinsi Sumatera Selatan
	SS.3	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	IKSS.4	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} \right) - 1 \times 100\%$ Dimana : y : Nilai deviasi Realisasi PAD : Realisasi PAD tahun ke n Belanja : Belanja yang bersumber dari PAD	Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus Belanja yang bersumber dari PAD merupakan rekapitulasi belanja dari BPKAD, dimana batas toleransi :

2.6. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		IKU	92,03
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi		IKU	5,00
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,96
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	IKU	1,12

2. Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1 Eselon III

a. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP		Indikator Kinerja Outcomes	1,61 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah		Indikator Kinerja Outcomes	14,53 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak		Indikator Kinerja Outcomes	5,19 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak		Indikator Kinerja Outcomes	100 %

b. Bidang Pendapatan Lain lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain		Indikator Kinerja Outcomes	95,12 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target		Indikator Kinerja Outcomes	89,45 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil		Indikator Kinerja Outcomes	83,71 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah		Indikator Kinerja Outcomes	84,42 %

c. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)		Indikator Kinerja Outcomes	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan		Indikator Kinerja Outcomes	92,64 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian		Indikator Kinerja	17,03 %

	atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah		Outcomes	
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Indikator Kinerja Outcomes	12,88 %

d. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	81,89 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	83,69 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	93,41 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

e. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Indikator Kinerja Outcomes	94,83 %
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Indikator Kinerja Outcomes	5,02 %
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	80,78 %

f. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

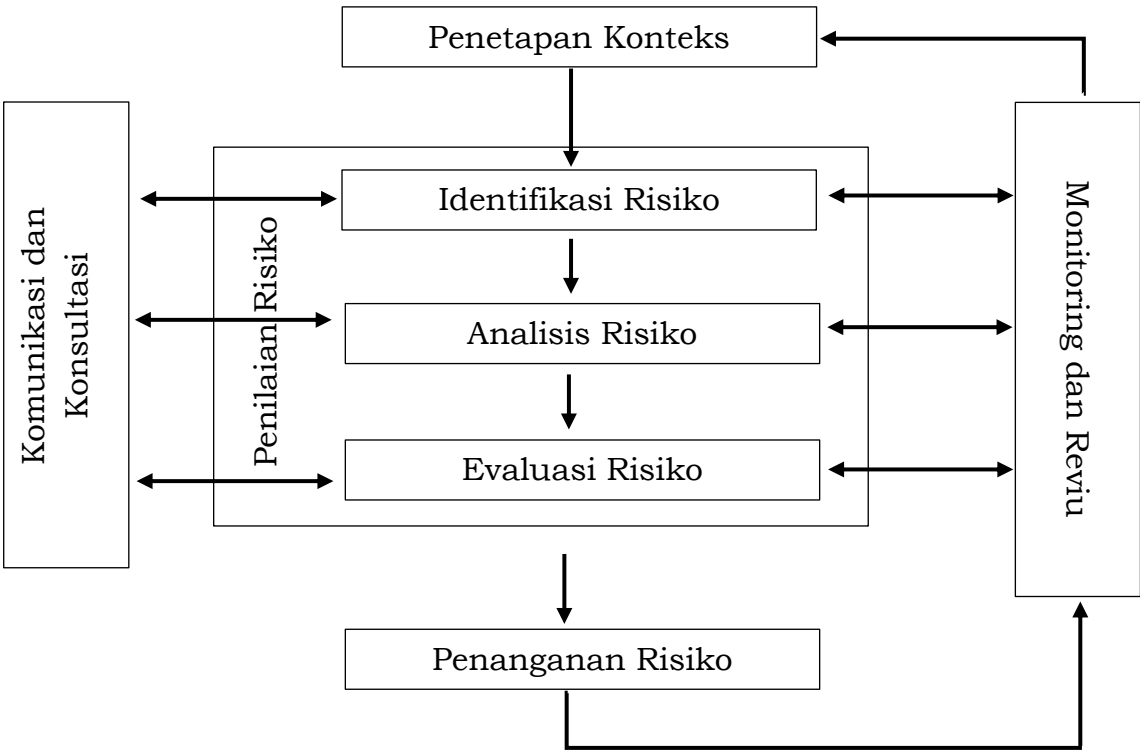
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	62,34 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	91,32 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Indikator Kinerja Outcomes	78,93 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	41,46 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	Indikator Kinerja Outcomes	100 MBPs

g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Indikator Kinerja Outcomes	8,87 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	9,72 %

2.7. Manajemen Pengelolaan Risiko

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negative terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sementara manajemen risiko merupakan budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan reviu, sehingga proses dimaksud digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3
Proses Manajemen Risiko

Terhadap tujuan dan sasaran strategis Bapenda yang telah dibahas pada Bab 2.1, adapun rumusan identifikasi risiko yang akan direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

1. Risiko Strategis (RSO), Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan dan sasaran strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan identifikasi Risiko Strategis (RSO) sebagai berikut :

- a. Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya) – Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD;
- b. Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait;
- c. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD;
- d. Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala OPD;
- e. Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD;
- f. Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi.

Dalam konteks identifikasi risiko strategis OPD, maka berikut hasil identifikasi Bapenda sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya pendapatan daerah dari target;
2. Rendahnya kontribusi PAD terhadap PDRB;
3. Tidak tercapainya kemandirian daerah dalam pembangunan yang bersumber pada PAD (revenue mobilization)

2. Risiko Operasional (ROO), identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD sebagai berikut :
- a. Banyaknya tunggakan pajak dari wajib pajak;
 - b. Tidak optimalnya pungutan pajak daerah;
 - c. Tidak tercapainya retribusi daerah dari target;
 - d. Tidak optimalnya pengelolaan pendapatan daerah;
 - e. Masih terdapat tindak pelanggaran;
 - f. Terhambatnya pelayanan pajak kepada wajib pajak;
 - g. Analisis jabatan dan analisis beban kerja SDM samsat belum merata;
 - h. Terdapat deviasi (-) daya serap anggaran dari rencana target SPD.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

**BAB IV
PENUTUP**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Anggaran

Implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 untuk mencapai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025. Untuk menunjang pencapaian sasaran tersebut didukung anggaran sebesar Rp. 269.252.993.469,- yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 meliputi tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan serta anggaran diuraikan sebagai berikut :

Tujuan dari Misi Keempat	Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pemerintahan
--------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan dari misi Keempat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke-4

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1. Meningkatnya Pendapatan Daerah	1. Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	92,03
2. Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	2. Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Persentase	0,96
	3. Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,12
3. Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan dari Perencanaan Awal	4. REVENUE MOBILIZATION Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD dalam Batas Toleransi	Persentase	5,00

Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan dan sasaran menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 maka akan dilaksanakan 3 Program, 11 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Administrasi Keuangan perangkat Daerah yang disediakan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah yang disediakan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang disediakan
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang disediakan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum yang disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah yg dilaksanakan
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan PAD
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

3.2. Anggaran Kinerja

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam mendukung kinerja adalah sebesar Rp. 267.332.993.469,- Dana tersebut guna mendukung 3 Program, 11 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan yang telah direncanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025.

Rincian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Badan Pendapatan Daerah diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
I	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	95%	257.156.929.169
1	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	80%	300.000.000
1.1	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100.000.000
1.2	5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000
1.7	5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000
2	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	93%	185.024.450.196
2.1	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	423 orang	184.480.950.196
2.2	5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	243.500.000
2.7	5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 laporan	300.000.000
3	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan BMD	87%	228.000.000

3.2	5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	200.000.000
3.6	5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	28.000.000
4	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	91%	504.266.000
4.2	5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen	121.266.000
4.4	5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	130.000.000
4.5	5.02.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 dokumen	210.000.000
4.7	5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	43.000.000
5	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	85%	1.469.026.463
5.4	5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	52.000.000
5.9	5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 orang	387.000.000
5.10	5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	200 orang	500.000.000
5.11	5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	50 orang	530.026.463
6	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan umum layanan perkantoran	70%	28.517.897.320
6.1	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	833.172.720
6.2	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.099.750.000
6.3	5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	750.000.000

6.4	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	2.584.374.600
6.5	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	5.550.000.000
6.6	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	3 dokumen	50.000.000
6.8	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	202.000.000
6.9	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	1.202.000.000
6.11	5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	16.246.600.000
7	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	64%	6.884.000.600
7.1	5.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	750.000.000
7.2	5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	2.100.000.000
7.5	5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1.322.500.600
7.6	5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	1.611.500.000
7.8	5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 dokumen	100.000.000
7.9	5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1.000.000.000
8	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	78%	26.579.933.204
8.1	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	92.000.000
8.2	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.127.000.000

8.3	5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	182.000.000
8.4	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	24.178.933.204
9	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	71%	7.649.355.386
9.1	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 unit	2.150.000.000
9.2	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	2.939.635.180
9.6	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	483.304.945
9.10	5.02.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi	2 unit	2.076.415.261
II	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95%	220.000.000
2	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	66%	220.000.000
2.10	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3 Laporan	220.000.000
III	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-5% s/d 5%	9.956.064.300
3	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase SOP pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	85%	9.956.064.300
3.1	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	637.400.000
3.2	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 Dokumen	1.150.000.000
3.3	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 laporan	2.000.000.000

3.4	5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 unit	1.255.000.000
3.5	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 laporan	1.625.000.000
3.6	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 laporan	734.392.000
3.7	5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	175.000.000
3.8	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 laporan	1.047.821.800
3.9	5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 dokumen	100.000.000
3.10	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	29 dokumen	589.450.500
3.11	5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 dokumen	50.000.000
3.12	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	2 Dokumen	375.000.000
3.13	5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	29 Laporan	50.000.000
3.14	5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	140.000.000
Jumlah					267.332.993.469

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, langkah / upaya-upaya yang dilaksanakan yaitu meliputi :

1. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Pajak Daerah antara lain :

- Melaksanakan Rekonsiliasi Pajak Daerah.
- Melaksanakan Rekonsiliasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
- Pertukaran data terkait penerimaan pendapatan daerah.
- Merintis pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
- Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal.
- Terus membangun sinergitas dengan mitra kerja antara lain; Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor, Desnet sebagai pihak ketiga di bidang IT, KPK, BPK dll.
- Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah.
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi.
- Membenahi dan memantapkan system dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah.
- Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak Daerah :

- Menambah kapasitas dan kecepatan Bandwith internet up to 100 MBPs
- Mengoperasikan 21 unit kendaraan Samsat keliling
- Mengoperasikan pelayanan Samsat Drive Thru sebanyak 1 unit

- Mengoperasionalkan pelayanan Samsat Corner di PIM Mall Palembang, PS Mall Palembang dan Lippo Plaza Lubuk Linggau
- Mengoperasionalkan pelayanan Samsat Desa di OKU Selatan
- Pengadaan komputer unit dan komputer jaringan untuk upgrading hardware
- Pelayanan informasi pajak berbasis IT antara lain e-Dempo, SOS Samsat, e-Signal, e-Commerce, penggunaan aplikasi Signal, pembayaran cashless, penggunaan back up data cloud server, penggunaan aplikasi berbasis web, penggunaan digitalisasi tax
- Pemeliharaan gedung kesamsatan untuk ruang tunggu yang representative
- Meningkatkan Kenyamanan ruang tunggu di samsat dengan pojok bacaan, ruang bermain anak serta ruang laktasi
- Penyediaan snack corner



PENUTUP

Terwujudnya pencapaian perencanaan kinerja dalam hal ini Rencana Kerja Tahunan merupakan tujuan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Proses pencapaian target dalam Rencana Kinerja Tahunan perlu di pantau secara rutin dan teratur sehingga target dapat diprediksi dan dievaluasi sedini mungkin selama evaluasi dimaksudkan untuk mendeteksi apabila target yang ingin dicapai masih relevan dengan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam melaksanakan visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 21 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19810923 200012 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

LAMPIRAN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Tabel. Matriks Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Indeks Tahun 2026 = 0,412)	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah	1.	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	91.97	92.03	92.21
		2. Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	2.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Persentase	0.95	0.96	0.98
			3.	Rasio PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah	Rasio	1,00	1,12	1,18
		3. Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	4.	REVENUE MOBILIZATION Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD dalam Batas Toleransi	Persentase	4,00	5,00	6,00

MATRIKS RENJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Tahun 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Meningkatnya Pendapatan Daerah	1. Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92.03%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAFRAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	637,400,000
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1,150,000,000	
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,000,000,000	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1,255,000,000	
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1,625,000,000	
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Paiak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Paiak Daerah	734,392,000	
				Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	175,000,000	
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	1,074,821,800			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Tahun 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100,000,000
							Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	589,450,500
							Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	50,000,000
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	375,000,000
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	50,000,000
							Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	140,000,000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16,246,600,000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Tahun 2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Indeks tahun 2026 = 0,412)	2. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap PDRB	2. Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,95	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	121,266,000		
				1,00			Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	130,000,000		
				Pengolahan Data Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	210,000,000			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	43,000,000			
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	220,000,000			
									Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	637,400,000
									Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1,150,000,000
									Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,000,000,000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Tahun 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan dari Perencanaan Awal	REVENUE MOBILIZATION Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD dalam Batas Toleransi	4,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1,255,000,000
							Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1,625,000,000
							Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	734,392,000
							Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	175,000,000
							Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	1,074,821,800
							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100,000,000
							Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	589,450,500
							Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	50,000,000
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	375,000,000
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	50,000,000
							Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	140,000,000